

PERSEPSI LEMBAGA STRATEGIS TERHADAP KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI*)

*(Perception of Strategic Institutes to Criteria and Indicators of Sustainable Forest
Management of Natural Production Forest)*

Oleh/By :

Aswandi dan/and Rusli MS Harahap

Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli

Sibaganding Km 10,5 Aek Nauli- Parapat 21174 Sumatera Utara; Telp. (0625) 41659, 41653

*) Diterima : 07 Desember 2005; Disetujui : 14 Desember 2006

ABSTRACT

The objective of this research was to know the perception of various strategic institution to each criterions and indicators specified to attainment of sustainable forest management (SFM) in natural production forest, to examine implementation of criterion and indicator and to know existing problems and also to formulate various strategy of SFM. The result indicate that accomplishment of prerequisite criterion bearing higher level especially indicator of certainty of area to reach SFM. Realized by each stakeholder that certainty of this status represent base for certainty of enterprising of forest, and uncertainty of this represent root of conflict that happened among forest peoples and forest enterprises. This problems is also happened by the effect of restriction of forest peoples to forest resources. Therefore strategy of trouble-shooting of forest management have to be directed to specified area arrangement, enhancing market and nature resources and involving people in the forest management. Evaluation of the implementation of criterion and indicator assessment, indicates that rigid mechanism of assessment tend to make difficult the evaluation that accommodate change dynamics that happened and also tend to have the character of technical prosedural so that require to be re-formulated especially with various aspect of forest disturbance an specific condition of forest.

Key words: Criterion and indicator, sustainable forest management, Analytical Hierarchy Process, forest consession

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi dari berbagai lembaga strategis terhadap setiap kriteria indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL), hasil pengujian penerapan kriteria dan indikator, permasalahan yang muncul, dan hasil perumusan berbagai strategi pengelolaan hutan lestari. Hasil menunjukkan bahwa pemenuhan kriteria prasyarat memiliki bobot tertinggi terhadap pencapaian pengelolaan hutan lestari khususnya indikator kepastian kawasan unit manajemen. Disadari oleh masing-masing *stakeholder* bahwa kepastian status unit manajemen merupakan dasar dari kepastian pengusahaan hutan dan ketidakpastian, hal ini merupakan akar dari konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemegang konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Masalah ini juga diakibatkan oleh tidak terakomodasikannya kepentingan masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Oleh karena itu strategi pemecahannya harus diarahkan pada penetapan kepastian kawasan, perbaikan pasar perkayuan (termasuk pengatasan *illegal trade*), dan pengikursertaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan. Dalam implementasi penilaian kriteria dan indikator PHAPL, mekanisme penilaian yang terlalu spesifik dan kaku cenderung menyulitkan penilai untuk mengakomodasikan dinamika perubahan yang terjadi dan juga cenderung lebih bersifat teknis prosedural, sehingga diperlukan perumusan kembali terutama berkaitan dengan berbagai aspek gangguan dan kondisi spesifik hutan alam produksi.

Kata kunci: Kriteria dan indikator, pengelolaan hutan lestari, Hak Pengusahaan Hutan

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan kuantitasnya, pengusahaan hutan alam produksi telah menjadi salah satu bentuk tata guna lahan penting di Indonesia. Namun kegiatan pengusahaan hutan ini juga telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti menipisnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, polusi air dan sedimentasi, serta beragam masalah sosial-ekonomi. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka konsep pengelolaan hutan alam produksi lestari sudah merupakan kewajiban untuk dilaksanakan.

Untuk menilai kinerja unit manajemen pengelolaan hutan apakah sudah memenuhi kriteria lestari sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan No. 4795 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL), perlu suatu standar penilaian.

Berbeda dengan sertifikasi yang bersifat *voluntary*, maka dalam kerangka PHAPL penilaian kriteria dan indikator ini bersifat wajib (*mandatory*). Jauh sebelum itu pemerintah juga telah menyiapkan seperangkat peraturan berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya hutan yang berwawasan lingkungan. Tetapi dalam perjalanannya, peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif bahkan cenderung hanya sebagai kelengkapan administrasi, terbukti hanya sedikit unit manajemen yang dianggap mengelola hutannya dengan baik, kondisi tegakan tinggal yang memprihatinkan dengan laju kerusakan yang terus meningkat.

Ketidakefektifan pelaksanaan peraturan tersebut perlu mendapat perhatian. Harus ada upaya untuk mengevaluasi di mana sesungguhnya ketidakefektifan itu terjadi, apakah terletak pada kebijakan itu sendiri, pengawasan dan pembinaan yang kurang memadai, kurangnya kesiapan teknis maupun ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mendukung atau akibat kondisi eksternal. Hasil penelitian ini dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi pengelolaan hutan yang tidak lestari.

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi berbagai lembaga strategis terhadap masing-masing kriteria dan indikator PHAPL, hasil pengujian penerapan kriteria dan indikator PHAPL, dan informasi permasalahan yang ada berdasarkan lokasi spesifik serta hasil perumusan berbagai strategi pengelolaan hutan lestari.

II. METODE PENELITIAN

A. Bahan dan Lokasi

Bahan yang digunakan adalah kriteria dan indikator yang terdapat pada Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795 Tahun 2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan serta Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pemanfaatan Hutan Produksi Lestari pada Unit Manajemen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam Produksi.

Dalam penelitian ini difokuskan pada kinerja perusahaan hutan pada HPH PT. Inanta Timber di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara beserta masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Selain itu penelitian juga dilakukan pada Dinas Kehutanan Mandailing Natal dan Dinas Kehutanan Riau, beberapa HPH yang terdapat di Riau seperti PT. Triomas FDI, PT. Rokan Raya Permai, PT. Essa Indah, PT. Yos Raya Timber, dan PT. The Best One Uni Timber. Sedangkan perguruan tinggi dan LSM yang turut menjadi responden adalah Program Ilmu Kehutanan Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian Universitas Simalungun, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lestari Hutan Indonesia.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner, *software Analytical Hierachy Process Expert*

Choice 9.0, tape recorder untuk wawancara, dan perangkat komputer.

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2004. Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengamatan lapangan dan wawancara terhadap berbagai lembaga strategis. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menganalisis data unit manajemen, sosial ekonomi penduduk.

Prosedur penelitian dalam pengumpulan data meliputi :

1. Pengamatan lapangan untuk kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan keempat aspek penilaian, yaitu aspek prasyarat, ekologi, produksi, dan sosial ekonomi masyarakat.
2. Pengisian form penilaian kriteria dan indikator pengelolaan hutan alam produksi lestari serta pembobotan masing-masing kriteria dan indikator. Kegiatan ini terutama ditujukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian di lapangan dan persepsi masing-masing *stakeholders* terhadap kriteria dan indikator yang telah ditetapkan tersebut.
3. Wawancara dilakukan terhadap Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, unit manajemen (HPH) yang masih aktif di Riau, dengan fokus wawancara pada unit manajemen serta masyarakat sekitar hutan yang menjadi fokus penelitian. Pertanyaan dialamatkan pada permasalahan dan kendala pelaksanaan penilaian kriteria dan indikator dan persepsi serta preferensi masing-masing *stakeholders* tersebut terhadap kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Daftar pertanyaan ini disusun dalam sebuah kuesioner.

C. Analisis Data

Persepsi *stakeholders* terhadap bobot kepentingan dari masing-masing kriteria dan indikator yang telah ditetapkan tersebut terhadap pencapaian tujuan PHAPL dihitung dengan menggunakan metode *Analytical Hierachy Process* (AHP). Menurut Saaty (1993), metode ini mampu membantu memecahkan permasalahan yang terstruktur maupun kompleks (tidak terstruktur) dengan data atau informasi yang terbatas dengan membangun hirarki sistem yang kompleks menjadi elemen-elemen pokok menurut hubungan yang esensial. Metode ini juga telah digunakan oleh Santosa (2000) untuk mengkaji kemungkinan implementasi sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari melalui peningkatan peran lembaga strategis.

Penyusunan hirarki kriteria dan indikator PHAPL didasarkan pada kriteria dan indikator yang telah ditetapkan dan secara sederhana ditunjukkan pada Lampiran 1. Sedangkan hirarki untuk pemberian bobot kepentingan terhadap masing-masing kriteria dan indikator digambarkan pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

Pemberian bobot kepentingan dilakukan dengan membandingkan masing-masing kriteria dan indikator secara berpasangan dengan menggunakan skala komparasi, disajikan pada Tabel 1.

Data yang telah dikumpulkan melalui pengisian form verifikasi, wawancara, dan pengisian formulir pemberian bobot kepentingan kriteria dan indikator PHAPL dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Alternatif strategi pengelolaan hutan yang dirumuskan mengacu pada persepsi berbagai *stakeholders* terhadap masing-masing kriteria dan indikator serta permasalahan pengelolaan hutan yang dihadapi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Pengelolaan Hutan

Meningkatnya jumlah perambahan dan *illegal logging* menciptakan iklim

Tabel (Table) 1. Skala perbandingan berpasangan (*Scale of couple comparison*)

Tingkat kepentingan (Numerical scale)	Definsi (Verbal scale)
1	Sama pentingnya (<i>Equal importance of both elements</i>)
3	Sedikit lebih penting (<i>Moderate importance of one element over another</i>)
5	Jelas lebih penting (<i>Strong importance of one element over another</i>)
7	Sangat lebih penting (<i>Very strong importance of one element over another</i>)
9	Mutlak lebih penting (<i>Extreme strong importance of one element over another</i>)
2,4,6,8	Nilai diantara dua tingkat kepentingan yang berdekatan (<i>Intermediate value between two adjacent judgments</i>)
1/2, 1/3, 1/4.....1/9	Kebalikan nilai tingkat kepentingan dari skala 1-9 (<i>Inverting or intensity of less importance of both elements</i>)

Sumber (Source) : Saaty (1993)

yang tidak mendukung upaya pencapaian PHAPL. Rendahnya harga pasar kayu bulat akibat masuknya kayu yang berasal dari *illegal logging* mengakibatkan unit manajemen tidak terpacu untuk mengelola hutannya secara lestari karena biaya yang dikeluarkan tidak diimbangi dengan harga yang sesuai. Rendahnya harga ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksinya, sehingga penebangan melebihi jatah tebang yang tidak dapat dihindarkan lagi untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan. Apabila hal ini tidak diperhatikan dalam perencanaan pengelolaan hutan maka bisa dipastikan pengelolaan hutan lestari tidak dapat tercapai.

Perubahan kebijakan kehutanan sebagai dampak tuntutan otonomi daerah dan perimbangan distribusi manfaat sumberdaya alam bagi daerah juga berpengaruh terhadap sistem pengelolaan hutan di Indonesia. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Kehutanan No 051 tahun 2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Produksi Alam. Berdasarkan keputusan tersebut luasan unit HPH dibatasi, hal ini berpengaruh terhadap penentuan jatah tebang yang akan cenderung mengurangi produksi tahunan apalagi jika dikaitkan dengan rendahnya potensi hutan, hal ini jelas tidak menguntungkan dari sudut pengelola hutan sebagai pelaku usaha. Kondisi ini dapat memicu praktek *mark up* data potensi hutan untuk memperoleh

jatah produksi tahunan yang lebih besar. Implikasinya jumlah yang akan dipanen akan jauh melebihi potensi dan kemampuan produktivitas hutan yang berujung pada ketidaklestarian sumberdaya hutan.

Selain itu juga terdapat kekhawatiran akan terjadinya pemahaman yang salah terhadap makna otonomi daerah yang dipahami sebagai kesempatan sebesar-besarnya untuk mengeksploitasi sumberdaya alam (hutan) guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Terdapatnya kecenderungan pemerintah daerah untuk mempromosikan ekspansi perkebunan kelapa sawit dengan mengubah ribuan hektar lahan hutan yang dapat menjadi ancaman terhadap kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan.

Permasalahan-permasalahan ini umumnya ada di luar jangkauan dan kemampuan unit manajemen untuk mengatasinya. Hal ini merupakan masalah besar yang menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh pemerintah dan pihak-pihak terlibat dengan komitmen yang kuat untuk tetap konsisten dalam menjalankan prinsip pengelolaan hutan lestari yang didukung oleh adanya kepastian dan penegakan hukum.

B. Kendala Penerapan Kriteria Indikator

Menurut pandangan unit manajemen, LSM, dan perguruan tinggi, pada prinsipnya kriteria dan indikator PHAPL yang ditetapkan pemerintah secara teknis

dapat diterapkan, karena pada dasarnya standar sertifikasi tersebut bukan hal baru melainkan merupakan bagian dari aktivitas unit manajemen sehari-hari. Jika dilihat dari peraturan yang ada dalam pengelolaan hutan, mulai dari Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga tata cara pembaharuan HPH, kesemuanya menekankan penilaian atas standar proses, di mana kinerja unit manajemen diukur dari seberapa tertib mengikuti prosedur, bukan pada kualitas hutan yang dikelolanya. Padahal pengelolaan hutan lestari dapat dicapai apabila terwujud keberlanjutan fungsi produksi, fungsi ekologi, dan daya dukung lahan serta fungsi sosial budaya masyarakat di sekitar hutan yang terlihat dari kondisi tegakan tinggal dan keanekaragaman hayati yang ada, kemampuan regenerasinya, dampak kegiatan pengelolaan terhadap tanah dan air serta kondisi masyarakat sekitar hutan.

Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk menyempurnakan seperangkat peraturan yang ada dengan mempertimbangkan dan memasukkan standar kinerja fisik akhir ke dalamnya. Dengan disertakannya standar kinerja fisik diharapkan ketidakefektifan pelaksanaan peraturan yang ada sekarang dapat dikaji dengan menelusuri proses pencapaiannya, sehingga diketahui cara dan upaya untuk memperbaikinya, sehingga standar kinerja fisik tersebut dapat dicapai.

Mekanisme penilaian kriteria dan indikator PHAPL yang ditetapkan pemerintah meskipun mengandung karakteristik demokratis, terbuka, dan partisipatif, dalam perspektif praktisi (unit manajemen) dan akademisi dirasakan rumit dan kompleks sehingga diprediksi akan sulit dilaksanakan. Kriteria dan indikator tersebut juga bersifat kaku karena dijabarkan dengan sangat rinci sehingga sulit mengakomodasikan dinamika perubahan yang terjadi serta cenderung bersifat prosedural teknis dengan melemahkan kon-

disi pelaksanaan pengelolaan hutan lestari di lapangan.

Kelemahan lain yang dirasakan dalam pelaksanaan penilaian kriteria dan indikator PHAPL di lapangan adalah kemungkinan terdapatnya bias penilaian akibat faktor-faktor lingkungan biofisik dan sosial yang mungkin memberatkan unit manajemen seperti tingkat kerawanan atau keamanan biofisik dan sosial wilayah yang tinggi. Kondisi ini terlihat dan dikeluhkan oleh kedua unit manajemen yang menjadi fokus penelitian. Beratnya permasalahan sosial yang menuntut perlunya alokasi pemanfaatan sumberdaya hutan bagi masyarakat yang langsung ataupun tidak langsung tergantung pada hutan secara lintas generasi, mengakibatkan semakin tinggi perhatian unit manajemen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Terfragmentasi ekosistem hutan pada lokasi penelitian akibat perubahan penutupan lahan juga mengakibatkan semakin berat beban tanggungan unit manajemen untuk mempertahankan fungsi ekologisnya. Semakin berat masalah ekologi dan sosial tersebut mengakibatkan semakin kecil luas kawasan hutan yang dapat diperuntukkan sebagai fungsi produksi oleh unit manajemen.

C. Persepsi terhadap Kriteria dan Indikator

Berdasarkan perhitungan bobot kepentingan terhadap masing-masing kriteria dan indikator, terdapat kecenderungan bahwa kriteria prasyarat dianggap memiliki bobot yang cukup tinggi dalam usaha pencapaian suatu pengelolaan hutan alam produksi lestari pada berbagai lembaga strategis (unit manajemen, pemerintah, LSM dan perguruan tinggi, dan masyarakat) terutama indikator kepastian kawasan unit pengelolaan hutan alam produksi lestari walaupun menurut masyarakat kriteria luas dan batas yang jelas antara unit pengelolaan dengan kawasan hukum adat mendapat bobot tertinggi (Lampiran 4). Akan tetapi jika kita lihat

secara rinci, kriteria luas dan batas yang jelas antara unit pengelolaan dengan kawasan hukum adat pada dasarnya juga mencerminkan kepastian kawasan hutan. Disadari bahwa kepastian status kawasan unit manajemen dalam penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan sejak awal akan memberikan jaminan kepastian kawasan hutan yang diusahakan.

Semua *stakeholders* sepakat bahwa ketidakjelasan penataan hutan dan tidak diikuti-sertakan masyarakat dalam kegiatan pengukuhan batas hutan merupakan akar permasalahan konflik yang terjadi antara masyarakat dan pengusaha hutan. Permasalahan ini juga terjadi akibat tidak terakomodasinya kepentingan masyarakat terhadap hutan, baik dalam bentuk pengakuan hak, kesempatan berusaha dalam kerangka pengelolaan hutan, dan kesempatan untuk memperoleh manfaatnya. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat rendah, atau tidak ada sama sekali.

Untuk tiga kriteria lainnya yakni produksi, ekologi, dan sosial, terdapat perbedaan persepsi bobot kepentingan masing-masing kriteria ini terhadap pencapaian pengelolaan hutan alam produksi lestari pada masing-masing *stakeholders*. Menurut persepsi unit manajemen, di antara ketiga aspek ini, pemenuhan kriteria produksi terutama kriteria kesehatan finansial dan kesehatan perusahaan memperoleh bobot yang relatif lebih tinggi. Hal ini dapat dimaklumi karena unit manajemen merupakan badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan pengusaha hutan yang dilakukannya. Tanpa adanya kelestarian usaha (kesehatan finansial dan kesehatan perusahaan) maka perusahaan tidak akan memiliki insentif untuk melestarikan hutan yang dieksploitasinya.

Oleh karena itu akan menjadi malapetaka bagi sumberdaya hutan apabila kecenderungan unit manajemen ini tidak diimbangi dengan penataan hutan dan pengaturan hasil yang tepat yang diperoleh kegiatan inventarisasi yang cermat.

Implikasi dari tidak adanya penataan hutan dan pengaturan hasil yang tepat akan mengakibatkan pembagian hutan ke dalam blok-blok tebangan tidak mencerminkan adanya dimensi waktu sehingga luas kawasan *virgin forest* telah habis sebelum siklus pertama berakhir sehingga besar kemungkinan, baik secara teknis maupun finansial unit manajemen yang melakukan praktek penebangan berulang (cuci mangkok).

Tidak adanya kepastian usaha jangka panjang juga tentu tidak akan mendorong perusahaan untuk berinvestasi dan reinvestasi secara memadai, terutama dalam penelitian dan pengembangan di mana dalam persepsi unit manajemen hal tersebut merupakan biaya yang akan mengurangi pendapatan yang diperoleh. Hal ini tercermin dari rendahnya bobot kriteria tingkat investasi dan reinvesasi (aspek produksi) yang ditanamkan kembali ke hutan menurut persepsi unit manajemen (Lampiran 4). Walaupun sebenarnya pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pengusaha hutan ini cukup besar, tetapi besarnya reinvestasi yang ditanamkan kembali ke hutan tidak lebih besar dari 1 % (Kartodihardjo, 1999).

Sedangkan menurut persepsi masyarakat dan pemerintah, pemenuhan kriteria sosial harus mendapatkan perhatian yang lebih tinggi setelah pemenuhan aspek prasyarat. Bahkan menurut persepsi masyarakat kriteria penataan batas yang jelas antara unit pengelolaan dengan kawasan hukum adat dan kriteria ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat secara adil mendapat bobot yang tinggi. Hal ini diakibatkan oleh pengalaman pahit masyarakat akibat pengusaha hutan yang selama ini telah memarginalkan masyarakat terhadap sumber hutan yang mereka warisi. Tanpa adanya usaha untuk mengikutsertakan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kegiatan pengelolaan hutan, maka konflik kepentingan antara masyarakat dan unit manajemen tidak akan terpecahkan.

Persepsi yang hampir sama juga ditunjukkan oleh lembaga pemerintah (Dinas Kehutanan). Hanya menurut lembaga ini kapasitas dan tersedianya mekanisme pemantauan dan evaluasi mendapat bobot yang tinggi setelah kriteria kepastian kawasan dan kejelasan luas dan batas yang jelas antara unit manajemen dengan kawasan hukum adat. Hal ini tentu dapat dipahami, karena pada dasarnya pemerintah sendirilah yang harus menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh unit manajemen serta harus mampu untuk melaksanakannya dengan baik.

Berdasarkan penelitian ini timbul suatu kekhawatiran di mana pemenuhan aspek ekologi mendapat bobot yang rendah dalam pencapaian PHAPL menurut semua *stakeholders*. Terkecuali kriteria ketersediaan prosedur dan implementasi pengendalian gangguan hutan menurut lembaga pemerintah yang mendapat bobot yang relatif tinggi (prioritas 9), kriteria lainnya mendapat bobot rendah sehingga prioritas bagi pencapaian PHAPL juga rendah yakni berkisar pada urutan 15 hingga 24 dari 24 kriteria. Secara rinci tingkat kepentingan masing-masing kriteria dan indikator terhadap pencapaian PHAPL dapat dilihat pada Lampiran 4.

D. Alternatif Strategi Pemecahan

Tujuan pengelolaan hutan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dilaksanakan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu konsep dasar pengelolaan hutan yang komprehensif dalam arti mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh terhadap kelestarian hutan serta *rethinking* menyeluruh terhadap kebijakan dan praktek pengelolaan yang tidak lestari.

1. Penataan Kawasan

Penataan kawasan yang detail akan menghasilkan kepastian kawasan jangka panjang, memperhatikan kepentingan so-

sial ekonomi masyarakat, dan pengembangan regional. Kapastian status penggunaan ini akan meminimumkan konflik dan tekanan terhadap sumberdaya hutan. Terakomodasinya kepentingan masyarakat terhadap hutan, baik dalam bentuk pengakuan terhadap hak-haknya, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaatnya akan meningkatkan kepastian berusaha, memudahkan pendefinisian *property right* dan pelaksanaan hak-hak mengelola sumberdaya hutan.

2. Penataan Pasar dan Nilai Sumberdaya

Struktur pasar diarahkan pada mekanisme pasar bersaing, dan diupayakan berkurangnya hambatan monopoli, dalam hal ini kebijakan integrasi HPH-industri harus dipertimbangkan kembali. Nilai sebenarnya dari suatu lahan hutan harus sama dengan biaya pembinaan ditambah nilai-nilai *inheren* lainnya sehingga tidak ada satu bentuk panen yang diperkenankan jika tidak dapat menyediakan biaya pembinaan dan pembangunan hutan yang diperlukan. Hal ini hendaknya merupakan kebijakan dasar setiap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Diketahui secara detail potensi hutan akan menghambat *over-eksploitasi* dengan prakondisi terjaminnya kelangsungan usaha jangka panjang. Diketahui dengan pastinya potensi hutan akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari pungutan kehutanan dengan mengurangi kebocoran dalam pelaksanaannya. Potensi yang akurat juga akan mendorong industri untuk menata dan merekonstruksi kapasitas terpasangnya sehingga secara tidak langsung akan mengurangi pemenuhan bahan baku dari *illegal logging*.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berlandaskan visi pemberian alternatif agar masyarakat tidak merusak hutan, tetapi diarahkan pada pemberian kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat terutama yang memiliki kearifan

tradisional dalam mengelola hutan. Strategi, mekanisme, dan rincian kebijakan tersebut hendaknya dikerjakan oleh *task-force* khusus dengan mempertimbangkan berbagai situasi setempat yang berbeda-beda.

4. Penetapan Tipologi Hutan

Penetapan tipologi unit pengelolaan hutan perlu dilakukan untuk menghindari timbulnya bias akibat faktor-faktor lingkungan, biofisik, dan lingkungan yang dapat memberatkan tujuan pengelolaan suatu unit manajemen hutan. Dengan memperhatikan tipologi unit pengelolaan hutan tersebut diharapkan prioritas tujuan pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan realistis sehingga kelestarian sumberdaya hutan berdasarkan tujuan pengelolaan hutan lestari dapat dicapai. Penetapan tipologi unit pengelolaan hutan didasarkan kepada masing-masing aspek ekologi, sosial, dan produksi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menurut persepsi berbagai *stakeholders* (para pihak), pemenuhan kriteria prasyarat dianggap memiliki bobot yang lebih tinggi dalam usaha pencapaian PHAPL terutama indikator kepastian kawasan unit pengelolaan hutan alam produksi lestari. Disadari bahwa kepastian status ini merupakan dasar bagi kepastian perusahaan hutan dan ketidakjelasan merupakan akar masalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan hutan selain akibat tidak terakomodasinya kepentingan masyarakat terhadap hutan, baik dalam bentuk pengakuan terhadap hak, maupun kesempatan berusaha dalam kerangka pengelolaan hutan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat rendah, atau tidak ada sama sekali. Oleh karena itu strategi pemecahan masalah pengelolaan hutan harus diarahkan pada permasalahan seperti penataan kawasan, penaa-

taan pasar dan sumberdaya hutan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme penilaian kriteria dan indikator yang ditetapkan cenderung kaku sehingga sulit mengakomodasikan setiap dinamika perubahan yang terjadi. Kriteria dan indikator yang disusun juga cenderung bersifat prosedural teknis dengan melemahkan kondisi pelaksanaan prosedur tersebut di lapangan. Karena permasalahan penilaian kriteria dan indikator pengelolaan hutan tidak terlepas dari masalah kinerja pengelolaan hutan itu sendiri maka selain perbaikan terhadap metode penilaian kriteria dan indikator itu sendiri juga diperlukan perbaikan konsep dasar pengelolaan hutan serta *re-thinking* terhadap kebijakan dan praktek pengelolaan yang tidak lestari.

B. Saran

Ketidakefektifan pelaksanaan peraturan yang ada perlu mendapat perhatian dan harus ada upaya yang serius untuk mengevaluasi mengapa ketidakefektifan itu terjadi, apakah terletak pada kebijakannya, pengawasan yang kurang memadai, kurangnya kesiapan teknis atau akibat kondisi eksternal. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki kondisi yang ada sehingga pengelolaan hutan yang lestari dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartodihardjo, H. 1999. Masalah kebijakan pengelolaan hutan alam produksi. Penerbit Pustaka Latin. Bogor.
- Saaty, T.L. 1993. Pengambilan keputusan bagi para pemimpin. Terjemahan. LPPM. Jakarta.
- Santosa, E. 2000. Studi kemungkinan implementasi sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari melalui peningkatan peran lembaga strategis. Skripsi Jurusan Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Tidak diterbitkan.

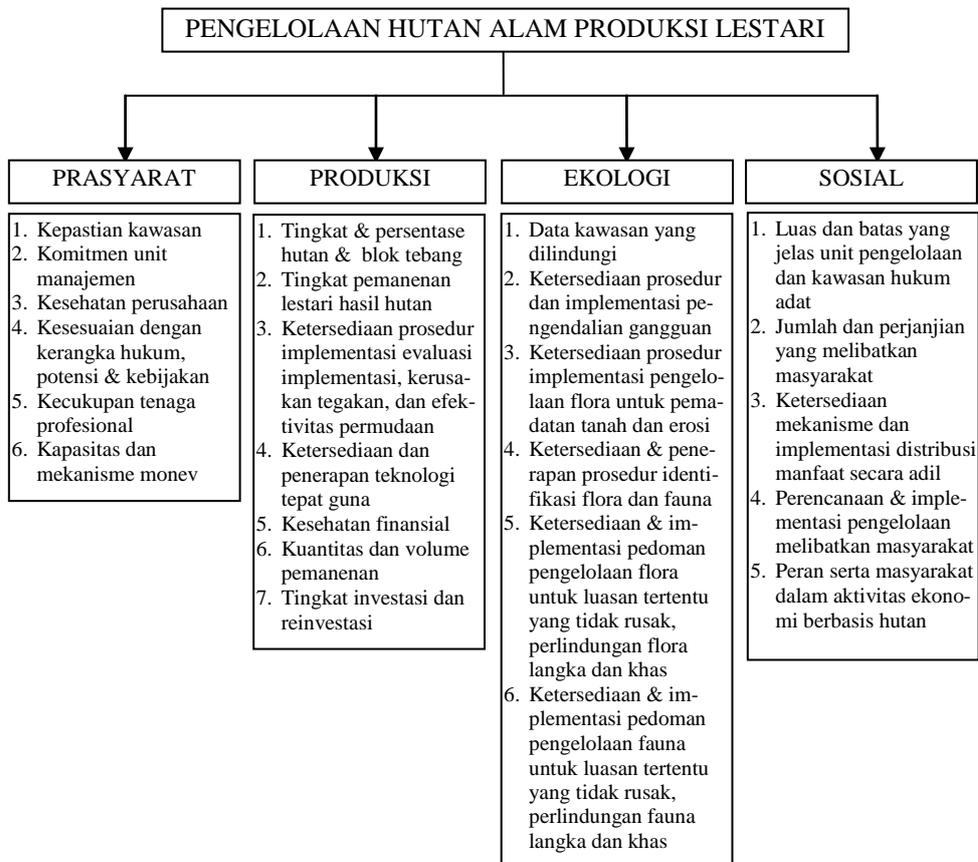
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 051/Kpts-II/ 2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Produksi Alam.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tanggal 3 Juni 2002 tentang Kriteria dan Indikator

Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan.

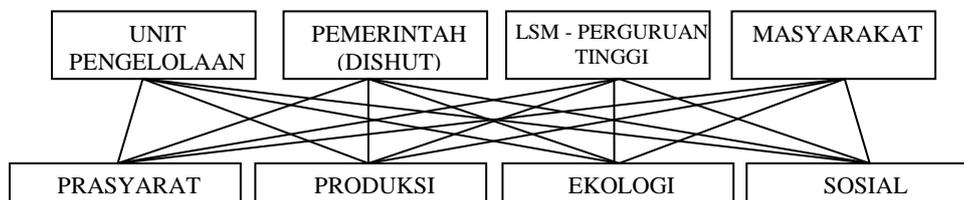
Keputusan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 34/VI-Set/2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pemanfaatan Hutan Produksi Lestari pada Unit Manajemen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam.

Lampiran (Appendix) 1. Kriteria dan indikator pengelolaan hutan alam produksi lestari (*Criteria and indicators sustainable forest management of natural production forest*)

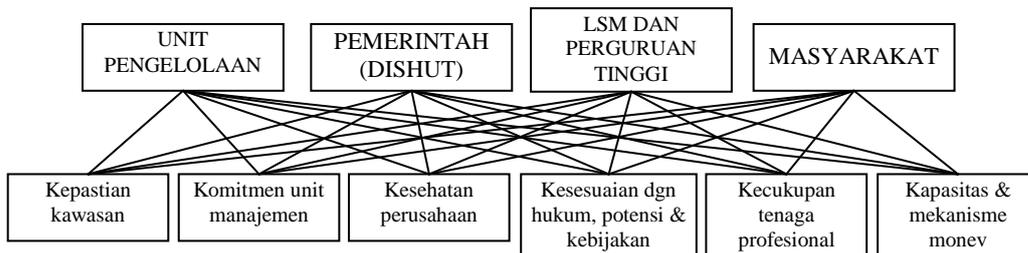


Sumber (Source) : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795 tahun 2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari

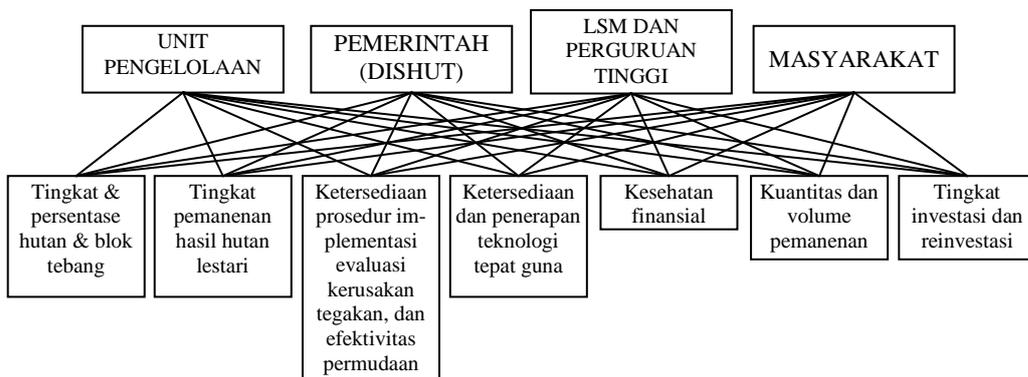
Lampiran (Appendix) 2. Hirarki untuk mengetahui bobot kepentingan masing-masing aspek kelestarian hutan menurut persepsi berbagai stakeholder (*Hierarchy to know importance wight of each forest permanence aspect according to perception of various stakeholders*)



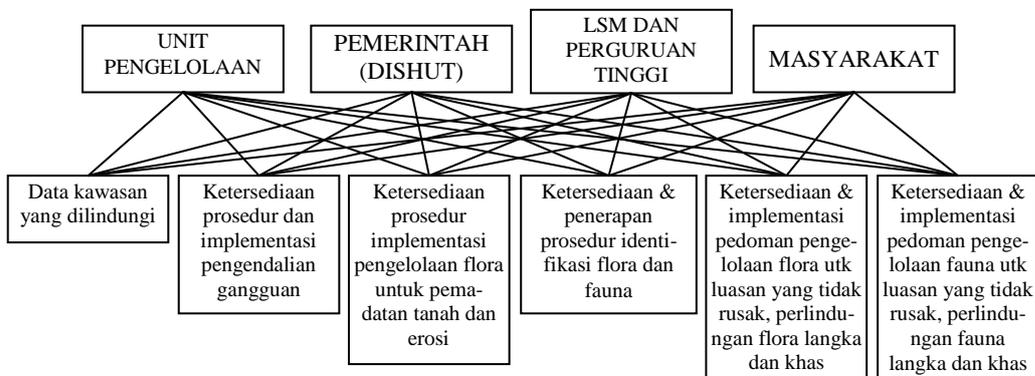
Lampiran (Appendix) 3. Hirarki untuk mengetahui bobot kepentingan masing-masing kriteria dalam setiap aspek PHL (*Hierarchy to know importance wight of each criterion in their SFM aspects*)



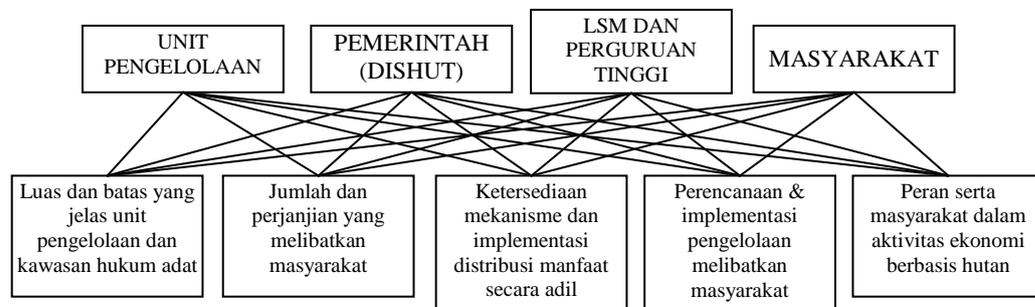
a. Aspek prasyarat (*Prerequisite aspects*)



b. Aspek produksi (*Production aspects*)



c. Aspek ekologi (*Ecology aspects*)



d. Aspek sosial (*Social aspects*)

Lampiran (Appendix) 4. Bobot dan prioritas masing-masing aspek dan kriteria dalam pencapaian tujuan pengelolaan hutan alam produksi lestari (*Weight and priority of each aspect and criterion in attainment of sustainable forest management of natural forest*)

Kriteria	Unit manajemen		Pemerintah (Dishut)		LSM dan perguruan tinggi		Masyarakat	
A. Aspek prasyarat	0,3889	I	0,3404	I	0,3019	I	0,3478	I
1. Kepastian kawasan unit pengelolaan	0,1135	1(1)	0,0746	1(1)	0,0579	1(1)	0,0667	1(3)
2. Komitmen unit manajemen	0,0497	5(7)	0,0560	4(5)	0,0507	3(7)	0,0584	4(7)
3. Kesehatan perusahaan	0,0667	2(3)	0,0373	6(13)	0,0362	6(15)	0,0417	6(11)
4. Kesesuaian dgn kerangka hukum, potensi dan kebijakan	0,0596	3(5)	0,0653	2(3)	0,0543	4(5)	0,0626	3(6)
5. Kecukupan tenaga profesional	0,0426	6(11)	0,0466	5(10)	0,0471	5(8)	0,0542	5(9)
6. Kapasitas dan mekanisme money	0,0568	4(6)	0,0606	3(4)	0,0557	2(2)	0,0642	2(5)
B. Aspek produksi	0,3333	II	0,2128	III	0,2453	III	0,1957	III
7. Tingkat dan persentase hutan dan blok tebangan	0,0476	3(8)	0,0363	2(14)	0,0372	3(14)	0,0297	3(14)
8. Tingkat pemanenan hasil hutan lestari	0,0433	4(9)	0,0376	1(12)	0,0399	1(12)	0,0318	1(12)
9. Ketersediaan prosedur implementasi evaluasi kerusakan tegakan, dan efektivitas permudaan	0,0260	6(17)	0,0351	3(15)	0,0356	4(16)	0,0284	4(16)
10. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna	0,0303	5(14)	0,0286	4(19)	0,0303	6(19)	0,0242	6(19)
11. Kesehatan finansial	0,0692	1(2)	0,0226	7(24)	0,0293	7(21)	0,0233	7(20)
12. Kuantitas dan volume pemanenan	0,0606	2(4)	0,0276	5(20)	0,0383	2(13)	0,0306	2(13)
13. Tingkat investasi dan reinvestasi	0,0173	7(21)	0,0251	6(22)	0,0346	5(18)	0,0276	5(17)
C. Aspek ekologi	0,1111	IV	0,1915	IV	0,1887	IV	0,1304	IV
14. Data kawasan lindung	0,0194	3(20)	0,0334	2(16)	0,0354	2(17)	0,0245	2(18)
15. Ketersediaan prosedur & implementasi pengendalian gangguan	0,0243	1(18)	0,0467	1(9)	0,0413	1(11)	0,0285	1(15)
16. Ketersediaan prosedur dan implementasi pengelolaan flora untuk pemadatan tanah dan erosi	0,0204	2(19)	0,0267	5(21)	0,0295	3(20)	0,0204	3(21)
17. Ketersediaan dan penerapan prosedur identifikasi flora fauna	0,0170	4(21)	0,0234	6(23)	0,0265	6(24)	0,0183	6(24)
18. Ketersediaan dan implementasi pedoman pengelolaan flora untuk luasan ttt yang tidak rusak, perlindungan flora langka dan khas	0,0146	6(24)	0,0300	4(18)	0,0277	5(23)	0,0192	5(23)
19. Ketersediaan dan implementasi pedoman pengelolaan fauna untuk luasan ttt yang tidak rusak, perlindungan fauna langka dan khas	0,0155	5(23)	0,0314	3(17)	0,0283	4(22)	0,0196	4(22)
D. Aspek sosial	0,1667	III	0,2553	II	0,2642	II	0,3261	II
20. Luas dan batas yang jelas unit pengelolaan dan kawasan hukum adat	0,0430	1(10)	0,0657	1(2)	0,0562	1(3)	0,0793	1(1)
21. Jumlah dan perjanjian yang melibatkan masyarakat	0,0269	5(16)	0,0438	4(11)	0,0504	4(9)	0,0573	4(8)
22. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat secara adil	0,0323	3(13)	0,0511	3(7)	0,0543	2(4)	0,0705	2(2)
23. Perencanaan implementasi pengelolaan melibatkan masyarakat	0,0296	4(15)	0,0474	5(8)	0,0498	5(10)	0,0529	5(10)
24. Peran serta masyarakat dalam aktivitas ekonomi berbasis hutan	0,0349	2(12)	0,0547	2(6)	0,0535	3(6)	0,0661	3(4)

Catatan (*Note*):

III = urutan prioritas aspek kelestarian

0,043 1(10) = 0,043 (bobot nilai), 1 (prioritas dari aspek), (10) (prioritas secara keseluruhan)